

DAFTAR PUSTAKA

- Hartoyo, J. 2022. Laporan Dana Desa Tak Jelas, Puluhan Warag Desa Kedungpoh Purworejo Segel Balai Desa. yogyakarta. InewsYogya.id. <https://yogya.inews.id/berita/laporan-dana-desa-tak-jelas-puluhan-warga-desa-kedungpoh-purworejo-segel-balai-desa/1>. 17 Maret 2022 (11:33)
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Meleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Rukin. (2019). *Metodoogi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Safitri, o. (2020). Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulurejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara. Jombang.
- Subri, S. Y. (2006). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Yalti, M. E. (2020). Tansparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. *Skripsi*. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Indra, S. (2018). Tansparansi Dana Desa Dalam Pembangunan desa DI dEsa Pelita Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Tambuwun, V. T., H. Sabijono., dan S. W. Alexander. 2018. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi* 13(4): 1.
- Tulis, Y. G., I. Utami., dan A. N. S. Hapsari. 2018. Vilage Fund Management Transparency: A Lesson Learned. *Jurnal of Accounting and Strategic Finance* 1(2): 1.
- Sakinah, N. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik* 1(1): 2.
- Moore, Barrington. 2008. Instrumen Penilaian Mandiri Dalam Pelayanan Publik Di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Magister. *Centre for Policy Studies, Partnership for Governance Reform*. Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada: Yogjakarta.

- Prianto, T. P. 2018. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(1): 4.
- Miftahuddin. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Ikripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Wiharto. 2011. Faktor Pendorong dan Penghambat Terjadinya Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik. *Sistem Transparansi Nasional Dalam Pelayanan Publik*. Maret 15. *Badan Pembinaan Hukum*: 1-22.
- Barokah, H. d. 2015. *Indeks Pembangunan Desa 2014*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: 1.
- Saraswati, S. d. 2019. *Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP)*. Dalam Mekanisme Penyusunan RKP. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Jakarta: 4.
- Brayen, T. T. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Arangka Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Ilmu Pemerintahan* 2(2): 5.
- Kessa, W. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia. Jakarta: 48.
- Erani, A. Y. 2015. *Sistem Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta Selatan: 14.
- Rusmianto, Y. 2018. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Windi, L. 2018. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(1): 3.
- Sudirman. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Mulyanigsih, S. 2019. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung. Lampung : 7-8

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017. Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 *tentang pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa*. Jakarta.

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan
Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093.

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 *Pedoman
Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara republic Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094.

Peraturan Menteri Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia* Nomor 11 Tahun 2019 *Tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Belanja Daerah*. 21 Juli 2014. Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.